

IMPLEMENTASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (STUDI KASUS: KUD TUNAS MUDA KABUPATEN SIAK-RIAU)

Pipin Dwi Astiti¹⁾, A. Faroby Falatehan²⁾, dan Eka Intan Kumala Putri³⁾

^{1,2,3)} Departemen Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper Wing 5 Level 11 Kampus IPB Dramaga, Indonesia
e-mail: ¹⁾pipindwiastiti@gmail.com

(Diterima 23 Juli 2021 / Revisi 31 Agustus 2021 / Disetujui 9 Juni 2022)

ABSTRACT

The decision to replant oil palm is a complex decision for smallholder farmers in Teluk Merbau Village who are members of the Tunas Muda KUD, Siak Regency, Riau Province. Oil palm replanting needs to be done because the age of oil palm plantations for KUD Tunas Muda farmers on average has reached a planting age of >30 years with a production yield of only 1.47 tons per hectare per year. The implementation of oil palm replanting is carried out through the People's Palm Oil Rejuvenation (PSR) program. This research aims to examine the applicable regulations regarding the implementation of oil palm replanting at KUD Tunas Muda and analyze the perception of smallholder farmers on the implementation of oil palm replanting. Data were analyzed using gap analysis and qualitative descriptive analysis. Adjusted to the Director General of Plantation Decree No.29/KPTS/KB.120/3/2017 concerning guidelines for the implementation PSR. The results of the analysis of the perception farmers indicate input aspects, financial aspects and institutional aspects that influence farmers' decisions in the implementation of oil palm rejuvenation. The stakeholder involvement aspect consists of 3 components: related stakeholders, stakeholder rights and stakeholder obligations. The implementation PSR program is very helpful and this program can only be accepted by oil palm farmers who are members of the Tunas Muda KUD membership.

Keywords: *gap analysis, qualitative descriptive analysis, replanting*

ABSTRAK

Keputusan peremajaan kelapa sawit merupakan keputusan kompleks bagi rumah tangga petani sawit rakyat, begitu juga bagi petani sawit di Desa Teluk Merbau yang tergabung dalam anggota KUD Tunas Muda Kabupaten Siak Provinsi Riau. Peremajaan kelapa sawit perlu dilakukan karena usia tanaman kelapa sawit petani KUD Tunas Muda rata-rata sudah mencapai usia tanam >30 tahun dengan hasil produksi hanya 1,47 ton per hektar per tahun. Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit yang dilakukan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aturan yang berlaku terkait pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di KUD Tunas Muda serta menganalisis persepsi petani sawit terhadap pelaksanaan peremajaan kelapa sawit. Data dianalisis menggunakan analisis kesenjangan serta analisis deskriptif kualitatif. Sesuai keputusan Dirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang pedoman pelaksanaan PSR. Hasil analisis persepsi petani menunjukkan aspek input, aspek finansial dan aspek kelembagaan yang berpengaruh pada keputusan petani dalam pelaksanaan peremajaan. Aspek keterlibatan *stakeholder* terdiri dari 3 komponen sub aspek yaitu: *stakeholder* terkait, hak *stakeholder* dan kewajiban *stakeholder*. Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui program PSR sangat membantu petani kelapa sawit dan Program PSR ini hanya dapat diterima oleh petani kelapa sawit yang tergabung dalam keanggotaan KUD Tunas Muda.

Kata kunci: analisis kesenjangan, analisis deskriptif kualitatif, peremajaan kelapa sawit

PENDAHULUAN

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman tahunan yang termasuk dalam familia *Palme* (Najmi 2019) dan merupakan komoditas utama tanaman perkebunan dalam perekonomian

(Utami *et al* 2017). Kelapa sawit juga merupakan produk pertanian yang strategis sebagai sumber minyak nabati (Stephani *et al* 2018). Sub sektor perkebunan kelapa sawit merupakan sektor unggulan di Indonesia. Meskipun menjadi unggulan namun kelapa sawit juga menjadi salah satu

kontribusi melesatnya laju kerusakan hutan Indonesia yang berimplikasi masiv sosial-ekonomi dalam 30 tahun terakhir (putri *et al.* 2018). Pertumbuhan sub sektor kelapa sawit didukung dengan meningkatnya pencapaian produktivitas yang tentunya dicapai secara berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan dan stabilitas produksi, teknik budidaya kelapa sawit menjadi sangat penting. Menurut Setyamidjaja (2006), teknik budidaya kelapa sawit terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: pembibitan, pembukaan lahan, rancangan kebun, penanaman, tanaman penutup tanah, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM), pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM), dan peremajaan. Menurut (Kotagama *et al.* 2013) peremajaan kelapa sawit merupakan praktek budidaya dalam pengelolaan tanaman tahunan untuk memaksimalkan dan menstabilkan pendapatan antar waktu. Sedangkan peremajaan dini diartikan sebagai penggantian tanaman sawit muda berumur 10-25 tahun milik petani atau perkebunan rakyat yang menghadapi masalah produktivitas rendah < 10 ton per hektar akibat kesalahan bibit, dengan tanaman kelapa sawit yang baru (Arsjad 2017). Selain itu perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan bagian dari rantai pasok agribisnis kelapa sawit yang perlahan dituntut untuk dapat menerapkan keberlanjutan (Saragih *et al.* 2018).

Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit juga harus memperhitungkan kelayakan dari aspek – aspek non *financial* yang terdiri dari aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, ekonomi, dan sosial, lingkungan (Demiyanti *et al.* 2013). Petani kelapa sawit sebelum melakukan peremajaan kelapa sawit dipastikan harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka selama peremajaan kelapa sawit dilakukan, karena dari mulai peremajaan kelapa sawit dilakukan sampai pada tanaman kelapa sawit menghasilkan kurang lebih butuh waktu sekitar 2,50 tahun sampai 3 tahun. Hal ini tentu sangat dirasakan bagi rumah tangga petani sawit, terutama petani sawit yang hanya memiliki luas lahan tidak lebih dari 2 hektar. Begitu juga bagi petani sawit di lokasi penelitian yakni di KUD Tunas Muda yang hampir 80% matapencariannya sebagai petani kelapa sawit. Pelaksanaan peremajaan bagi petani sawit rakyat dihadapkan pada faktor pembiayaan yang

cukup besar. Pelaksanaan peremajaan itu sendiri kurang lebih membutuhkan dana sekitar 63 juta per hektar (BPDPKS 2020). KUD Tunas Muda merupakan salah satu KUD yang mendapatkan bantuan dari BPDPKS untuk mengikuti program PSR.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara peraturan yang berlaku yakni Keputusan Dirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 dengan realisasi peremajaan di KUD Tunas Muda yang dilakukan melalui program PSR. Mengetahui persepsi dari petani sawit KUD Tunas Muda dalam pelaksanaan peremajaan yang meliputi aspek input (pemilihan lahan perkebunan plasma atau swadaya), ketersediaan sarana produksi seperti (bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja), sitem peremajaan yang dipilih (sistem peremajaan konvensional), aspek finansial meliputi: sumber dana atau modal (bantuan PSR, pinjaman KUR, tabungan peremajaan dan tabungan pribadi), aspek kelembagaan terdiri dari peletihan yang diperoleh (teknik budidaya), akses informasi dan teknologi, akses pasar penjualan TBS (penentuan harga TBS dari Disbun Kabupaten Siak sedangkan penjualan TBS melalui PTPN V Siak dan perusahaan rekanan KUD Tunas Muda).

METODE

LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di KUD Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi dilakukan dengan *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Pengambilan data primer dan sekunder dilaksanakan pada bulan September – November 2020.

METODE ANALISIS DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari petani sawit KUD Tunas Muda meliputi: karakteristik petani sawit KUD Tunas Muda, persepsi anggota dan pengurus KUD Tunas Muda terhadap pelaksanaan peremajaan kelapa sawit, aset-aset yang dimiliki petani sawit KUD Tunas Muda yang akan melaksanakan peremajaan kelapa sawit. Petani sawit rakyat merupakan

pelaku rantai pasok hulu memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem rantai pasok yang terintegrasi (Yutika,2019).

Data sekunder diperoleh dari pihak-pihak yang terkait seperti data dari BPS, Dinas Perkebunan Siak, PTPN V Siak, Kantor Desa Teluk Merbau, KUD Tunas Muda. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah disertasi, tesis, skripsi, *toolkit*, jurnal nasional, jurnal internasional, artikel, internet, dan literatur lainnya yang dapat mendukung penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan teknik survei, yaitu teknik yang bertujuan mengumpulkan data dari sejumlah variabel pada suatu kelompok melalui wawancara, observasi langsung dan pelaksanaan FGD (*Forum Group Discussions*). Pada penelitian ini terdapat dua unit analisis, yaitu responden dan informan kunci (*key person*). Penentuan responden menggunakan prosedur *probability sampling*, yaitu simple random sampling dengan target populasi adalah anggota KUD Tunas Muda yang mengikuti program peremajaan kelapa sawit sebanyak 100 orang, dan responden ditentukan sebanyak 20 orang.

KESESUAIAN PERATURAN TENTANG PEREMAJAAN KELAPA SAWIT DI KUD TUNAS MUDA DAN IMPLEMENTASINYA

Peraturan yang digunakan sebagai acuan di dalam analisis ini adalah Keputusan Dirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit. Berikut uraian langkah-langkah penentuan aturan yang digunakan:

- a. Penentuan Peraturan yang akan dijadikan acuan, yakni Keputusan Dirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit.
- b. Menelaah isi peraturan dengan sistem kategori yang akan digunakan. Pada Tabel 1 disajikan matriks kategori isi dari peraturan yang berlaku.

Tabel 1. Matriks Kategori Isi Peraturan

Unit Analisis	Kategori (Aspek)	Sub-Kategori (Parameter)
Keputusan Dirjen Perkebunan No. 29/KPTS/KB. 120/3/2017	Keterlibatan stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja stakeholder yang terlibat • Hak stakeholder • Kewajiban stakeholder

Sumber: Diadaptasi dari Fibriani (2018)

c. Setelah menelaah isi dari peraturan menggunakan kategori sistem selanjutnya antara peraturan dengan implementasi pelaksanaan peremajaan di KUD Tunas Muda menggunakan analisis kesenjangan. Analisa kesenjangan ini dimodifikasi dari Febrian (2018) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Komponen-komponen atau aspek yang akan dianalisis diuraikan dalam sitem kategori sesuai dengan Tabel 10. Penentuan standar acuan adalah Keputusan Dirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- 2) Hasil dari pengkategorian peraturan yang berlaku selanjutnya ditentukan menjadi acuan untuk mengetahui pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di KUD Tunas Muda. Informasi atau data implementasi pelaksanaan peremajaan di KUD Tunas Muda diperoleh dari wawancara mendalam terhadap *key persons*. Data-data implementasi pelaksanaan peremajaan di lapangan (*de facto*) kemudian dianalisis kesenjangan terhadap isi peraturan (*de jure*) untuk menganalisis sejauh mana implementasi pelaksanaan peremajaan di KUD Tunas Muda dengan peraturan yang telah ditentukan.
- 3) Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif:
 - i. Perhitungan skor kesesuaian masing-masing sub-aspek
 Pemberian skor dilakukan untuk mengkuantifikasikan kesesuaian antara isi peraturan dengan implementasi di lapangan pada setiap aspek kajian. Dalam penelitian ini terdapat 3 aspek yang menjadi kajian, yaitu: keterlibatan stakeholder, hak stakeholder, kewajiban stakeholder. Cara penentuan skor untuk setiap sub-aspek kategori adalah sebagai berikut:

$$X_i = \frac{a_i}{n_i} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- X_i : Skor tingkat kesesuaian pada sub aspek i
- a_i : Jumlah komponen dari sub-aspek i yang terpenuhi
- N_i : Jumlah seluruh komponen yang dikaji dalam sub-aspek i

ii. Perhitungan nilai kesenjangan untuk masing-masing sub-aspek

$$Y_t = E - X_t \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- Y_i : Nilai kesenjangan sub-aspek i
- E : Expected Value (Harapan ket-ercapaian) dengan nilai 100%
- X_i : Skor tingkat kesesuaian pada sub aspek i

iii. Perhitungan rata-rata nilai kesenjangan pada masing-masing aspek

$$X = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- X : skor tingkat kesesuaian pada aspek keterlibatan *stakeholder*
- X_1 : siapa saja *stakeholder* yang terlibat
- X_2 : hak masing-masing *stakeholder*
- X_3 : kewajiban masing-masing *stakeholder*

iv. Perhitungan nilai kesenjangan antara semua aspek dengan implementasi di lapangan

$$Gap = \frac{X}{1} \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

- Gap : Skor tingkat kesesuaian pada semua aspek
- X : aspek keterlibatan *stakeholder*

v. Analisis kesenjangan

- Apabila nilai kesenjangan = 0%, artinya tidak terdapat kesenjangan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi di lapangan aspek sudah sejalan dengan peraturan.

- Apabila nilai kesenjangan <50%, artinya implementasi aturan dilapangan sudah berjalan cukup baik sesuai dengan peraturan. Pada kondisi ini, perlu pengawasan pada implementasi di lapangan agar setiap aspek yang sudah sesuai tetap dapat dipertahankan seperti dalam kondisi saat ini.
- Apabila nilai kesenjangan >50%, artinya implementasi aturan di lapangan masih kurang sesuai. Pada kondisi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan agar aspek-aspek yang tercantum didalam peraturan dapat berjalan sehingga dapat mewujudkan peremajaan kelapa sawit rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Apabila nilai kesenjangan = 100, tidak terdapat kesesuaian atau tidak sejalan sama sekali antara implementasi di lapangan dengan dengan peraturan.

Analisis kesenjangan pada penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja KUD Tunas Muda dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun dengan menggunakan Peraturan Menteri Pertanian No.18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit. Mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk mengurangi nilai kesenjangan agar lebih sejalan dengan standar acuan yang diharapkan dalam peraturan tersebut.

Persepsi Petani Sawit terhadap Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit

Persepsi petani terhadap peremajaan kelapa sawit merupakan pemberian makna dari petani terhadap suatu obyek yang didasari oleh pengetahuan dan pengalaman, pengorganisasian dan interpretasi petani dalam peremajaan kelapa sawit. Petani kelapa sawit cenderung melihat suatu komoditas berdasarkan nilai ekonomi yang mampu menghasilkan dan meningkatkan produksi TBS. Metode analisis dalam persepsi pelaksanaan peremajaan kelapa sawit bagi anggota KUD Tunas Muda menggunakan analisis diskriptif kuantitatif dengan pemberian skor pada aspek-aspek yang telah ditentukan.

- a. Aspek input
 1. Jenis lahan yang diremajakan (lahan plasma atau lahan swadaya)
 2. Ketersediaan sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida dan atau herbisida, tenaga kerja)
 3. Sistem peremajaan yang dipilih
- b. Aspek finansial
 1. Sumber dana atau modal yang ada (modal pribadi, pinjaman, bantuan)
 2. Instansi atau lembaga pemberi modal
 3. Alokasi dana yang ada untuk peremajaan
- c. Aspek kelembagaan
 1. Pelatihan yang diperoleh (teknik budidaya)
 2. Akses informasi dan perkembangan teknologi terkait peremajaan dan teknik budidaya kelapa sawit
 3. Akses pasar untuk penjualan TBS

Pengukuran dan penentuan skor persepsi dari aspek input, finansial dan aspek kelembagaan dengan menggunakan skala likert dengan jumlah responden 20 orang, maka nilai skala maksimum= 100. Berikut perhitungan skala likert menurut Riduwan (2010):

Tahap pertama, setiap jawaban atau dukungan sikap dapat diukur dalam lima tingkatan dan diberi skor yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rentang Kelas Penilaian

No	Kriteria	Skor
1.	Sangat (tidak setuju, tidak sesuai, tidak ada)	1
2.	Tidak setuju/tidak sesuai/tidak ada	2
3.	Netral	3
4.	Setuju/sesuai	4
5.	Sangat (setuju, sesuai)	5

Sumber: Riduwan 2010

Tahap kedua, melakukan perhitungan untuk rentang kelas sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai minimum} &= \text{skor terendah} \times \text{jumlah sampel} \\ &= 1 \times 20 \\ &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai maximum} &= \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah sampel} \\ &= 5 \times 20 \\ &= 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rentang kelas} &= \\ &= \frac{\text{jumlah nilai maximum} - \text{jumlah nilai minimum}}{\text{jumlah kategori}} \\ &= \frac{100-20}{5} \\ &= 16 \end{aligned}$$

Tahap ketiga, membuat rentang kelas untuk masing-masing kategori yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rentang kelas penilaian

No	Penilaian	Kriteria
1.	20 - 36	Sangat tidak setuju
2.	36.1 - 52	Tidak setuju
3.	52.1 - 68	Netral
4.	68.1 - 84	Setuju
5.	84.1 - 100	Sangat setuju

Sumber: Riduwan 2010

Tahap keempat, menghitung kalkulasi skor dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Ridwan 2010):

$$\text{Rumus Index} = \frac{\text{Total skor}}{y} \times 100 \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

Total skor = didapat dari penjumlahan keseluruhan dari perkalian kategori dengan frekuensi responden menjawab kategori tersebut.

$$\begin{aligned} \text{Total skor} &= \sum(\text{kategori} \times \text{frekuensi}) \dots \dots \dots (6) \\ y &= \text{skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden, dimana skor tertinggi sama dengan lima} \end{aligned}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik rumahtangga responden dicerminkan oleh variabel umur responden, tingkat pendidikan responden, jumlah tanggungan keluarga, jenis pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan, lama menjadi petani sawit, keanggotaan responden di KUD Tunas Muda (data pribadi KUD Tunas Muda 1997). Karakteristik ini dijadikan acuan untuk mengetahui seperti apa keadaan responden sesuai dengan kondisi yang ada dengan pengamatan langsung dan metode wawancara.

Tabel 4. Karakteristik Umur Responden

Kategori umur	Jumlah (responden)	Persentase (%)
Dewasa muda (20-40 tahun)	2	10,00
Dewasa tengah (41-64 tahun)	18	90,00
Tua (>64 tahun)	-	-

Sumber: data pribadi diolah, 2021

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 4. Menurut BPS (2001) usia produktif tenaga kerja adalah antara 15 sampai 64 tahun. Sesuai dengan tingkat umur, rata-rata umur responden adalah 64 tahun. Respon terbanyak berada pada kategori dewasa tengah (41-64) sebesar 90%. Umur responden pada kategori dewasa muda (20-40 tahun) sebesar 10%.

Tabel 5. Karakteristik Pendidikan Responden

Kategori pendidikan	Jumlah (responden)	Persentase (%)
Rendah (Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar)	11	55,00
Sedang (SMP)	1	5,00
Tinggi (SMA dan Perguruan tinggi)	8	40,00

Sumber: data pribadi diolah, 2021

Rata-rata lama pendidikan responden adalah 7 tahun. Artinya tingkat pendidikan pada tingkat Sekolah Rakyat sebesar 55%. Kategori tingkat pendidikan SMA sebesar 40%. Dan paling terakhir kategori pendidikan responden di tingkat SMP sebesar 5%.

Tabel 6. Karakteristik Tanggungan Keluarga

Kategori jumlah tanggungan keluarga	Jumlah (responden)	Persentase (%)
Kecil (0-1 orang)	7	35,00
Sedang (2-3 orang)	11	55,00
Besar (>3 orang)	2	10,00

Sumber: data pribadi diolah, 2021

Rata-rata jumlah tanggungan rumahtangga adalah 2,22 orang. Artinya, jumlah tanggungan rumahtangga berkisar pada kategori 2-3 orang, yakni sebesar 55% dan responden dengan tanggungan 0-1 orang sebesar 35%. Jumlah tang-

gungan keluarga ini berkaitan erat dengan total pengeluaran rumahtangga.

Tabel 7. Karakteristik Pekerjaan Utama

Kategori pekerjaan utama	Jumlah (responden)	Persentase (%)
Petani sawit	19	95,00
PNS	1	5,00
Lain-lain	-	-

Sumber: data pribadi diolah, 2021

Pekerjaan utama rumahtangga responden sebesar 95% sebagai petani sawit dengan jumlah responden 19 orang. Pekerjaan lain-lain sebesar 1% yakni sebagai pegawai negeri sipil. Artinya rumah tangga responden secara keseluruhan bekerja sebagai petani sawit, yang berarti pendapatan terbesar juga dari hasil perkebunan kelapa sawit.

Tabel 8. Karakteristik Pekerjaan Sampingan

Kategori pekerjaan sampingan	Jumlah (responden)	Persentase (%)
Karyawan KUD		
Tunas Muda	4	20,00
Berdagang	3	15,00
Buruh tani	1	5,00
Tidak ada sampingan	12	60,00

Sumber: data pribadi diolah, 2021

Rumah tangga responden rata-rata tidak mempunyai pekerjaan sampingan, sebagai karyawan KUD Tunas Muda, 15% berdagang dan 5% sebagai buruh tani perkebunan sawit.

Tabel 9. Karakteristik Keputusan Menjadi Petani Sawit

Kategori sejak kapan menjadi petani sawit	Jumlah (responden)	Persentase (%)
Generasi pertama antara tahun 1985-1986	20	100,00

Sumber: data pribadi diolah, 2021

Rumahtangga petani secara keseluruhan menjadi petani sawit sejak generasi pertama pada tahun 1985-1986 di Desa Teluk Merbau, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 100%. Generasi pertama ini dimaksud dengan awal

mulanya transmigrasi masuk di Desa Teluk Merbau.

STRUKTUR NAFKAH RUMAHTANGGA PETANI SAWIT KUD TUNAS MUDA PERIODE 2019 (SEBELUM PEREMAJAAN)

Struktur pendapatan terdiri dari tiga sumber nafkah yaitu *on-farm*, *off-farm*, dan *non-farm*. Pada penelitian ini struktur pendapatan rumahtangga petani hanya ada dua sumber nafkah saja yaitu sektor *on-farm* dan *non-farm*.

Tabel 10. Struktur Pendapatan Rumahtangga Petani KUD Tunas Muda 2019

Gol. Kelas	Luas (ha)	Pendapatan	
		on-farm	Non-farm
Bawah	2-4	13.924.791	8.400.000
Tengah	4,1-10	61.777.803	24.000.000
Atas	>10	199.927.368	36.000.000

Sumber: data pribadi diolah, 2021

ANALISIS KESENJANGAN PERATURAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT

Pada pembahasan ini yang menjadi acuan bagi analisis kesenjangan adalah peraturan Dirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Program PSR. Secara umum pelaksanaan program PSR ini belum dapat berjalan optimal terutama dalam hal penyusunan RAB P0 (Rencana Anggaran Belanja Dasar) seperti kegiatan terasan atau *land clearing*, tumbang cacah atau *chipping*, luku, pembuatan lobang tanam, penggadaan pupuk dan penanaman bibit.

Tabel 11. Hasil Analisis Kesenjangan Peraturan Peremajaan Kelapa Sawit

Aspek	Sub-aspek	Jumlah komponen terpenuhi (a)	Skor ($b = \frac{a}{N} \times 100\%$)	Nilai kesenjangan (c = 100%-b)
Keterlibatan stakeholder	1. Stakeholder terkait	5 dari 5	100	-
	2. Hak stakeholder	9 dari 10	90	10%
	3. Kewajiban stakeholder	18 dari 30	60	40%

Sumber: data pribadi diolah, 2021

Aspek keterlibatan *stakeholder* dalam penelitian ini meliputi:

1. Siapa saja *stakeholder* yang terkait, diantaranya: lembaga-lembaga dalam perkebunan kelapa sawit, dinas kabupaten atau kota, dinas provinsi, Direktur Jenderal Perkebunan, BDPKPS
 2. Hak *stakeholder*, yang terdiri 10 sub-sub aspek dari kelima *stakeholder* yang terkait
- Kewajiban *stakeholder*, terdiri dari 30 sub-sub aspek dari kelima *stakeholder* yang terkait dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit.

Kesenjangan sebesar 40% pada kewajiban *stakeholder* terjadi dikarenakan dari pemerintah masih kurang melakukan pengecekan secara langsung pada saat program PSR dijalankan, sebatas peninjauan dari dinas terkait dalam pelaksanaannya. Kesenjangan sebesar 10% pada hak *stakeholder*, masih perlu adanya evaluasi terutama dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia yang masih belum terserap oleh petani sawit KUD Tunas Muda yang melaksanakan peremajaan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan sebesar 55% latar belakang pendidikan petani hanya pada tingkatan SD sederajat atau Sekolah Rakyat.

Penelitian sebelumnya pada (Anhar,2018) hanya menelaah dari aturan-aturan lokal daerah setempat, meskipun peraturan daerah sudah ditetapkan dalam pengelolaan hutan mangrove. Hal ini menjadi salah satu alasan dalam penelitian yang dilakukan disesuaikan dengan peraturan terakhir yang ditetapkan dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat.

PERSEPSI PETANI SAWIT KUD TUNAS MUDA DALAM PELAKSANAAN PEREMAJAAN KELAPA SAWIT

Persepsi petani sawit KUD Tunas Muda dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit terbagi atas tiga aspek input, aspek finansial dan aspek kelembagaan. Aspek input meliputi (jenis lahan, sarana produksi dan sistem peremajaan), aspek finansial (sumber dana, penerimaan dana dan alokasi dana), aspek kelembagaan (pelatihan, akses informasi dan teknologi, akses pasar).

1. Aspek Input Petani Sawit

Aspek input yang mempengaruhi persepsi petani sawit dalam peremajaan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Persepsi Petani Sawit dari Aspek Input

Aspek Input	Kategori Skor	Responden	Persentase (%)
Jenis lahan	Sangat tidak sesuai	-	00,00
	Tidak sesuai	-	00,00
	Netral	-	00,00
	Sesuai	-	00,00
	Sangat sesuai	20	100,00
Sarana produksi	Sangat tidak sesuai	-	00,00
	Tidak sesuai	-	00,00
	Netral	-	00,00
	Sesuai	3	15,00
	Sangat sesuai	17	85,00
Sistem peremajaan	Sangat tidak sesuai	-	00,00
	Tidak sesuai	-	00,00
	Netral	-	00,00
	Sesuai	-	00,00
	Sangat sesuai	20	100,00

Sumber: Data Primer (diolah) 2021

Jenis lahan yang diremajakan sesuai dengan ketentuan program PSR adalah lahan plasma, persepsi ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 100% dengan kategori sangat sesuai. Kenapa lahan plasma yang dijadikan pilihan untuk menerima bantuan program PSR? Hal ini dikarenakan pemerintah pusat dan daerah sangat berharap penuh kepada petani swadaya yang belum tergabung didalam koperasi yang membawahi usaha kelapa sawit dapat segera bergabung dan menjadi bagian dari koperasi yang terdapat di lokasi masing-masing. Agar pemerintah lebih mudah dalam hal pelaporan, pengawasan, pemberian pelatihan serta penyaluran bantuan kepada petani sawit rakyat. Serta lebih mempermudah dan mempercepat proses pencapaian petani sawit rakyat yang berkelanjutan.

Ketersediaan sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida, herbisida) dalam pelaksanaan peremajaan sebesar 85% yang menunjukkan kesesuaian secara sepenuhnya. Ketersediaan bibit yang bersertifikat telah disediakan dari PTPN V yang bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Siak. Pupuk, pestisida dan herbisida untuk ketersediaannya dikelola dari KUD Tunas Muda yang bekerjasama dengan supplier pupuk dari Pekanbaru. Dalam penentuan supplier pupuk dari KUD ada sebagian petani sebesar 15% yang masih belum sepenuhnya menerima jenis penggunaan pupuk yang akan dipakai. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman petani tentang jenis-jenis pupuk, pestisida dan herbisida.

Sehingga perlunya sosialisasi dari dinas terkait agar petani sawit KUD Tunas Muda dapat memahami jenis dan manfaat dari pupuk, pestisida dan herbisida.

Sistem peremajaan secara konvensional adalah sistem peremajaan yang dipilih oleh KUD Tunas Muda dalam menjalankan program PSR, sistem peremajaan konvensional ini dengan cara penumbangan serentak. Sebesar 100% petani menyetujui peremajaan dengan sistem konvensional.

2. Aspek Finansial Petani Sawit terhadap Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit

Aspek finansial merupakan kesiapan petani dalam hal sumber dana untuk biaya peremajaan, sumber dana yang dimaksud adalah sumber dana (dari dana pribadi, pinjaman, bantuan dari pemerintah), dana dari BPDPKS apakah disetujui dan sesuai untuk keperluan peremajaan (mencukupi atau tidak), alokasi dana (diperuntukkan untuk apa saja). Aspek finansial biasanya menjadi alasan utama bagi petani sawit untuk melakukan peremajaan. Pada Tabel 13 dijelaskan tentang persepsi petani dari aspek finansial dalam penerapan peremajaan.

Tabel 13. Persepsi Petani Sawit dari Aspek Finansial

Aspek finansial	Kategori skor	Responden	Persentase (%)
Sumber dana atau modal	Sangat tidak sesuai	-	00,00
	Tidak sesuai	3	15,00
	Netral	7	35,00
	Sesuai	7	35,00
	Sangat sesuai	3	15,00
Penerimaan dana	Sangat tidak sesuai	-	00,00
	Tidak sesuai	-	00,00
	Netral	-	00,00
	Sesuai	-	00,00
	Sangat sesuai	20	100,00
Alokasi dana	Sangat tidak sesuai	-	00,00
	Tidak sesuai	3	15,00
	Netral	6	30,00
	Sesuai	10	50,00
	Sangat sesuai	1	5,00

Sumber: Data Primer (diolah) 2021

Pelaksanaan peremajaan kurang lebih membutuhkan dana sebesar 63 juta per hektar. KUD Tunas Muda mendapat bantuan dari dana hibah BPDPKS senilai 30juta,- per hektar, sumber dana yang lain juga berasal dari tabungan peremajaan petani sawit KUD Tunas

Muda yang kurang lebih dananya senilai 40juta,- yang di potong dari penjualan TBS Rp133.350,- per bulan selama kurang lebih 25 tahun. sebesar sawit KUD Tunas Muda. Dari persepsi petani terkait sumber dana menunjukkan sebesar 35% dan 15% petani sudah merasa dana yang tersedia sesuai untuk pelaksanaan peremajaan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Rata-rata petani kelapa sawit yang sudah tercukupi secara ekonomi adalah petani kelapa sawit yang memiliki luasan lahan >4 hektar. Sedangkan petani sawit yang masih belum tercukupi kebutuhannya adalah sebesar 15 %, yaitu petani yang luas lahannya hanya sekitar 2 hektar saja, ini juga termasuk 35% petani yang memilih netral. Kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan peremajaan kelapa sawit sebesar Rp26 juta, belum lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari petani selama kurang lebih 2,5-3 tahun selama tanaman belum menghasilkan, sehingga membutuhkan dana pinjaman untuk memenuhi kekurangannya. Melalui kemudahan KUR dari bank BRI, bank Mandiri petani yang akan melakukan peremajaan kelapa sawit dapat memperoleh pinjaman dana.

Dana yang diperoleh petani sawit KUD Tunas Muda dari BPD PKS melalui program PSR senilai 30juta per hektar sudah diterima dan ditransfer melalui nomor rekening yang telah terdata di KUD Tunas Muda atas nama masing-masing petani yang telah terdaftar. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 100%. Salah satu keuntungan menjadi anggota koperasi adalah petani tidak perlu direpotkan dengan proses pengurusan *update* data serta kelengkapannya, karena semua data anggota koperasi sudah diinput dan direkap oleh pengurus KUD Tunas Muda, termasuk juga proses pendaftaran program PSR.

Persepsi petani dari alokasi dana menunjukkan 50% petani sudah sesuai, sedangkan 15% menunjukkan ketidaksesuaian. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program PSR ini belum dapat berjalan optimal terutama dalam hal penyusunan RAB P0 (Rencana Anggaran Belanja Dasar) seperti kegiatan terasan atau *land clearing*, tumbang cacah atau *chipping*,

luku, pembuatan lobang tanam, pengadaan pupuk dan penanaman bibit.

3. Aspek Kelembagaan Petani Sawit KUD Tunas Muda terhadap Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit

Kelembagaan dalam perkebunan petani sawit selain dari instansi pemerintah juga terdapat dari kelembagaan pekebun lainnya yang merupakan lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha dibidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris. Keterlibatan *stakeholder* dalam peremajaan kelapa sawit sangat berperan penting, lembaga-lembaga yang terkait tentu mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam tercapainya peremajaan kelapa sawit di KUD Tunas Muda. Bentuk dan peranan lembaga-lembaga tersebut ditentukan berdasarkan: bentuk pelatihan, penyuluhan ataupun sosialisasi terkait pelaksanaan peremajaan kelapa sawit ataupun teknik budidaya, kemudahan dalam mendapatkan akses informasi dan teknologi terkait pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dalam menunjang tingkat produktivitas kelapa sawit petani, serta akses penjualan TBS yang tepat terutama untuk kesesuaian harga dan biaya angkut TBS. Persepsi petani dari aspek kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Persepsi Petani Sawit dari Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan	Kategori skor	Responden	Persentase (%)
Pelatihan dan sosialisasi	Sangat tidak sesuai	-	00,00
	Tidak sesuai	-	00,00
	Netral	10	50,00
	Sesuai	9	45,00
Akses informasi dan teknologi	Sangat sesuai	1	5,00
	Sangat tidak sesuai	-	00,00
	Tidak sesuai	-	00,00
	Netral	8	40,00
Akses pasar	Sesuai	10	50,00
	Sangat sesuai	2	10,00
	Sangat tidak sesuai	-	00,00
	Tidak sesuai	-	00,00
	Netral	-	00,00
	Sesuai	17	85,00
	Sangat sesuai	3	15,00

Sumber: Data Primer (diolah) 2021

Peranan *stakeholder* terutama dari PTPN V selaku perusahaan naungan dari petani plasma KUD Tunas Muda serta Dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Siak, PT Sinar Agro Raya dan PT. Berlian Inti Mekar sebagai mitra dalam penjualan TBS sangat mendukung keberlangsungan peremajaan kelapa sawit petani. Pencapaian sebesar 45% dan 15% untuk kesesuaian pelatihan dan sosialisasi. Bentuk pelatihan yang dilakukan antara lain pelatihan penumbuhan kebersamaan pekebun (PKP), pelatihan penguatan kelembagaan, pengembangan kelembagaan dan usaha, kepemimpinan, manajemen administrasi dan keuangan, teknik budidaya, ISPO, panen dan pasca panen, informasi pasar dan promosi, pengolahan sarana dan prasarana perkebunan, pemetaan lokasi perkebunan.

Dari pelatihan yang telah dilakukan terdapat 50% petani yang masih menganggap pelatihan bersifat biasa saja atau netral. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi penggunaan pupuk yang masih belum sesuai, seperti penggunaan bumbu penyedap (miwon atau sasa) untuk diaplikasikan di kebun sawit mereka, serta pemahaman terkait sertifikasi ISPO yang masih banyak belum diketahui oleh petani. Namun secara umum pelatihan dan sosialisasi sudah dapat diterima dengan baik oleh petani, pemahaman dan pendekatan secara personal ataupun sosialisasi lanjutan dapat dilakukan oleh pengurus KUD Tunas Muda ataupun dinas terkait pada saat rapat anggota koperasi ditiap bulannya ataupun pada saat acara informal (kegiatan yasinan, rapat internal kelompok tani).

Pentingnya akses informasi dan teknologi bagi petani KUD Tunas Muda dalam pelaksanaan peremajaan ditunjukkan dengan kesesuaian pencapaian sebesar 50% dan 10%. Pemanfaatan teknologi dengan penggunaan mobil banking koperasi untuk mempermudah petani terutama dalam hal finansial. Petani yang masih menganggap kurang sesuai akses informasi dan teknologi ini sebesar 40%, hal ini dikarenakan rata-rata mereka sudah berusia lanjut dan tidak terbiasa dengan penggunaan *handphone android*.

Keberadaan tengkulak disetiap perkebunan sawit rakyat memang tidak dapat terpisahkan, kebutuhan mendesak juga menjadi salah satu

faktor utama petani sawit menjual TBS ke tengkulak. KUD Tunas Muda dalam meminalisir penjualan TBS petani ke tengkulak dengan cara bermitra dengan tengkulak untuk penyesuaian harga dan penetapan transport angkut TBS. Penentuan akses penjualan TBS KUD Tunas Muda selain di PTPN V juga bisa dialokasikan ke PT Sinar Agro Raya dan PT. Berlian Inti Mekar, dengan kesepakatan harga dan penempatan team grading dari pihak KUD Tunas Muda yang mengawal buah petani saat dilakukan penimbangan di PKS. Serta kesesuaian harga jual TBS dengan penetapan harga dari Dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Siak. Akses pasar yang ditentukan ini sepenuhnya disetujui dan sesuai dengan kemauan petani sawit KUD Tunas Muda dengan pencapaian 85% petani merasa sesuai dan 15% sangat sesuai dengan kebijakan akses pasar yang ditentukan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angreany S. 2015 mengelompokkan persepsi petani terhadap inovasi peremajaan dan penerapan peremajaan kelapa sawit, yang terbagi pada faktor internal (umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, luas lahan dan motivasi berusahatani), faktor eksternal (tingkat ketersediaan sarana produksi, frekuensi kegiatan penyuluhan, tingkat akses informasi serta dampak perkebunan besar). Perbedaan penerapan peremajaan kelapa sawit ini, dilakukan karena pola pelaksanaan peremajaan yang dilakukan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, *stakeholder* sudah berada di posisi yang tepat dan tidak terdapat kesenjangan 0,00%, namun perlu pengoptimalan dalam merespon kendala petani kelapa sawit.
2. Perlunya pemanfaatan teknologi dari aspek input, finansial dan kelembagaan guna peningkatan produksi serta penentuan akses pasar yang tepat

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun saran-saran yang diberikan peneliti sebagai rekomendasi dan pembuatan

kebijakan ataupun program oleh pemerintah ataupun pihak terkait, yaitu:

1. Sosialisasi dari pemerintah baik pusat ataupun daerah terkait pentingnya peranan koperasi terutama dalam mendukung pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat
2. Sosialisasi dan pelatihan baik dari pemerintah ataupun *stakeholder* yang berkaitan dengan tambahan pendapatan penghasilan keluarga: berternak, berkebun sayur dan buah
3. Pemerintah dan *stakeholder* diharapkan dapat merespon dan menanggapi serta memproses dengan cepat kendala petani sawit khususnya terkait peremajaan kelapa sawit rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Suroto. 2016. Gap Analysis (Analisis Kesenjangan) [internet]. [diunduh Februari 2020]. Tersedia pada <https://sis.binus.ac.id/2015/07/28/gap-analysis-analisis-kesenjangan/>.
- Anggreany S. 2015. Penerapan Peremajaan Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Anhar PF. 2018. Analisis Nilai Ekonomi Dan Kelembagaan Terhadap Keberlanjutan Pemanfaatan Mangrove Di Pulau Tanakeke [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Arsjad Asmar. 2017. Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Tantangan dan Hambatan Di Masa Depan. Arpakasindo. Medan.
- [BPDPKS] Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 2020. Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Tersedia pada bpdp.or.id.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2001. Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2018.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Kelapa Sawit Indonesia *Indonesian Oil Palm Statistics 2018* [internet]. [diunduh 30 November 2019]. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/>
- Boulding, Kenneth dan Herman E.D.1993. *InValuing the Earth: Economics, Ecology, Ethics*: Cambridge (US): MIT Press.
- Data Pribadi KUD Tunas Muda. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 1997.
- Demiyanti T. Priatna. BW (2013). Analisis Kelayakan Investasi Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, *Forum Agribisnis: Agribusiness Forum* *Agribisnis : Agribusiness Forum*, 3(1), 33-54. <https://doi.org/10.29244/fagb3.1.33-54>
- Febrian T, 2018. Evaluasi Kompensasi Pembayaran Jasa Lingkungan Kota Cirebon Dan Kabupaten Kuningan [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Kementrian Pertanian. 2017. Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2017.
- Kotagama HB, Al-Alwi AJT, Boughanmi H, Zekri S, jayasuriyah H, Mbaga M. 2013. Economics Analyisi Determining The Optimal Replanting Age of Date Palm. *Agriculturalan Marine Sciences*18:51-61.
- Najmi L. N. (2019). Status Keberlanjutan Pengelolaan Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, *Forum Agribisnis: Agribusiness Forum*, Vo.9 No.1 Maret 2019 ISSN2252-5491.DOI: <https://journal.ipb.ac.id/22525491/fagb.10.1.1-10>
- PutriE. I. K., , Darmawan Hadi A., Amalia Rizka, Panjaitan Nurmala K. 2017. Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Dan Ekologi Rumah tangga Petani Di Daerah Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Dua Desa Di Kalimantan Tengah). 2017. [https://journal.ipb.ac.id/Sosiologi Pedesaan](https://journal.ipb.ac.id/SosiologiPedesaan).
- Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung (ID): Alfabetha.
- Saragih, I. K., Rachmina, D., & Krisnamurthi, B. (2020). Analisis Status Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Jambi. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 8(1), 17-32. <https://doi.org/10.29244/jai.2020.8.1.17-32>

Setyamidjaja, D. 2006. Seri Budidaya Kelapa Sawit. Yogyakarta (ID):Kanisius

Suharno, S., Yuprin A.D., Y. A., & Barbara, B. (2017). Analisis Kinerja Usahatani Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Melalui Pola Kemitraan di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 3(2), 135-144. <https://doi.org/10.29244/jai.2015.3.2.135-144>

Stephanie, H., Tinaprilla, N., & Rifin, A. (2018). EFISIENSI PABRIK KELAPA SAWIT DI INDONESIA. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 6(1), 27-36. <https://doi.org/10.29244/jai.2018.6.1.13-22>

Utami R, Putri EIK, Ekayani M (2017): Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Vol.22 (2): 115-126 <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI> DOI: 10.18343/JIPI.22.2.115

Yutika, F., Cahyadi, E. R., & Mulyati, H. (2019). Perilaku Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Dan Pola Plasma Terhadap Praktik Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar, Riau. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 7(2), 102-112. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.102-112yt>